

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DIY**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi pelamar umum (CPNS)/non PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tanpa batas	disalahgunakan untuk penipuan	melindungi data PNS
2	Hasil uji kesehatan PNS & CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	menjaga privasi
3	Hasil rekomendasi pengukuran kompetensi, tes psikologi, konseling psikologi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	menjaga privasi
4	Dokumen PNS yg masih dalam proses penanganan pelanggaran disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai ada keputusan hukum yg tetap	merugikan PNS ybs	melindungi azas praduga tak bersalah
5	Biodata PNS Pemda DIY yang mengajukan perceraian dan mengajukan pernikahan lebih dari satu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	menjaga privasi
6	Data Rincian nilai kinerja instansi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai pemerinkatan kinerja instansi diumumkan	Menimbulkan keresahan pegawai+E20	Menjaga kondisi kerja agar selalu kondusif
7	Data Rincian nilai kinerja individu	Pergub 48 tahun 2015 dan PP 46 Tahun 2011	tak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	menjaga privasi

8	Data dan dokumen perorangan pegawai ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> )	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	menjaga privasi
		UU ASN			
9	Data pertimbangan Tim Penilai Kinerja dalam hal Pemindehan, Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian PNS dari jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas karena rahasia Negara	akan menghambat proses pemindehan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural			
10	Data Pemindehan , Pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural dan seleksi JPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	akan menghambat proses pemindehan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural			
		PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>- Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka</li> </ul>	Sampai tebitnya SK Pemberhentian	akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
11	Data pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</p> <p>PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	Sampai diterbitkannya SK	akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

12	Akses data informasi kepegawaian pada Aplikasi User Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah DIY	UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen	tidak ada batas waktu	bisa disalahgunakan	data terproteksi
13	IP (Internet Protocol) Address server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Permen Kominfo No 41/PER/MEN-KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	tidak ada batas waktu	bisa disalahgunakan	data terproteksi
14	Dokumen penawaran kontrak	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
15	Rekomendasi Pengadaan Pegawai Non PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan pengumuman pengadaan	Menimbulkan keresahan bagi calon pegawai yang mengikuti ujian	Menjaga suasana kondusif

16	Hasil Ujian Dinas dan PI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Pergub No 17 tahun 2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS	Sampai dengan terbitnya STLUD dan STLUPI	Menimbulkan keresahan bagi PNS yang mengikuti ujian	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
17	Usulan Formasi Jabatan Calon Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan diumumkan	Menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga suasana kondusif

**Mengetahui**  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY**

**R. AGUS SUPRIYANTO**  
**NIP.19600318 198603 1 012**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**  
**Pembantu**  
**Badan Kepegawaian Daerah DIY**

**PRAPTO NUGROHO, SH**  
**NIP. 19610705 198703 1 013**

**OPD : BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata Pegawai	UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.UU No. 43 Tahun 1999	Selama yang bersangkutan menjadi PNS  Apabila mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi  Melindungi dari penyalahgunaan data / informasi yang bersangkutan